

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun belakangan kata “*governance*” menjadi perbendaharaan yang banyak digunakan dalam diskusi administrasi pembangunan dan demokrasi. *Governance* mengacu pada perubahan makna dari *government* atau pemerintah menjadi sebuah proses pemerintahan yang baru, jenis politik yang baru, sebuah cara yang baru dalam memecahkan masalah kebijakan dan metode baru untuk mengatur masyarakat. *Governance* juga mengacu pada hasil atau hasil bersama yang dicapai melalui interaksi aktor yang berbeda¹. Ini berarti bahwa pemerintah dalam membuat kebijakan publik tidak lagi semata-mata hanya urusan pemerintah saja tetapi dengan keterlibatan berbagai aktor non-pemerintahan yang relevan seperti LSM, perusahaan swasta, maupun warga negara. Dalam banyak literatur *governance* terdapat empat makna dominan dari istilah *governance* yaitu *governance as good governance or as corporate governance*; *governance as new public management*; *governance as multi-level governance or inter-governmental relations*; dan *governance as network governance*. Dari keempat konsep diatas, semuanya menekankan pada proses pemerintahan daripada struktur pemerintah².

Perspektif *governance* pada dasarnya merupakan proses pembuatan kebijakan, dimana semua prosesnya melibatkan unsur pemerintahan, yaitu

¹ Rhodes, R.A.W. (1996): “*The New Governance: Governing without Government*”, *Political Studies*, XLIV, hal. 652-667.

² Klijn, E.H. and Koppenjan, J. (2016); “*Governance Network In The Public Sector*”. New York: Routledge

pemerintah yang berperan untuk menciptakan suasana sosial dan politik yang kondusif. Sektor swasta berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, dan juga masyarakat yang berperan untuk memfasilitasi interaksi sosial dan politik yang memadai bagi mobilisasi individu atau kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, politik dan sosial³, kesemuanya memiliki peran yang sama-sama penting. Dalam *governance*, pemerintah bukan menjadi penentu tetapi merupakan salah satu aktor penggerak yang mampu memfasilitasi masyarakat dan privat untuk aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi dari pemerintah adalah untuk memfasilitasi interaksi antara aktor sosial ekonomi dan politik untuk mengatasi masalah. Pemerintah mengacu pada kegiatan yang termasuk didalamnya yaitu otoritas formal dan lembaga formal negara yang dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan *governance* atau pemerintahan disisi lain mengacu pada kegiatan mengemudikan dan mengontrol sosial dan ekonomi melalui aksi bersama yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama⁴.

Pergeseran konsep “*government*” to “*governance*” menyiratkan lebih sedikit pemerintah tetapi lebih banyak pemerintahan atau “*more steering*”. Fragmentasi dari pemerintah ini berarti berkurangnya kontrol pemerintah dalam pengambilan keputusan dan implementasi. Ini dikarenakan pemerintah berinteraksi dengan aktor-aktor lain yaitu sektor publik (*public sector*), sektor private (*private sector*), dan masyarakat (*civil society*) yang bertujuan untuk

³ Syamsurizaldi, dkk. (2019). *Model Collaborative Governance pada Nagari Rancak di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1), 99-11

⁴ Torfing, J., B.G. Peters, J. Pierre and E. Sorensen.2012. *Interactive Governance. Advancing and Paradigm*, Oxford: Oxford University Press.

pertukaran sumber daya dalam memberikan pelayanan publik⁵. Ketiga komponen tersebut mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat, dan dengan keseimbangan tersebut maka akan terwujudnya keterlibatan aktor nonpemerintah dalam tata kelola pemerintahan. Namun, keterlibatan disini bukanlah sebagai pemegang kendali atas pemerintahan, akan tetapi keterlibatan yang dimaksud yaitu pemenuhan kebutuhan publik sesuai dengan segmentasi kemampuan aktor.

Governance dalam bidang kebijakan publik biasanya terkait dengan hukum dan sistem formal yang disediakan oleh pemerintah di berbagai tingkatan, tetapi muncul realitas baru yang mengatakan bahwa tindakan sepihak sekarang ini semakin digantikan oleh *“interactive forms of governance” where steering, control, and coordination are result of many hands rather than the iron fist of government.* Dalam bukunya Torfing et al mengatakan bahwa *Interactive Governance* merupakan sebuah proses yang kompleks dimana sejumlah aktor sosial dan politik berinteraksi dengan kepentingan yang berbeda untuk merumuskan, mempromosikan, dan mencapai tujuan bersama dengan cara memobilisasi, bertukar dan menyebarkan berbagai ide, aturan, dan sumber daya⁶.

Jika dikaitkan dengan realitas sekarang ini yang mana terdapat aktor-aktor lain yang terlibat dalam merumuskan suatu kebijakan, sudah seharusnya bagi pemerintah untuk lebih interaktif dalam menjalankan pemerintahannya. Salah satu yang menjadi aspek penting yang sekarang ini harus dimiliki pemerintah yaitu

⁵ Martinez, Laia. 2011. *Governance Networks as Collaborative platforms for Innovation in the Public Sector.* Network Governance: Theories, Methods, and practice. RUC October 2011 hal. 1-13

⁶ Torfing, J., B.G. Peters, J. Pierre and E. Sorensen.2012. *Interactive Governance. Advancing and Paradigm,* Oxford: Oxford University Press.

“*networking*” atau jaringan. Birokrasi hierarkis sudah tidak lagi dapat memenuhi permintaan yang kompleks dan dianggap tidak cocok untuk menghadapi permasalahan masyarakat yang sering melampaui batas-batas organisasi⁷. Dengan demikian bermunculan model *governance* baru yang memungkinkan untuk merespon permasalahan publik secara kreatif. Instansi pemerintah diposisikan sebagai generator nilai publik dalam jaringan hubungan *multi organizational*, *multi governmental*, dan *multisectoral* yang semakin meningkatkan ciri pemerintahan modern. Model *governance* yang baru yaitu *governing by network* atau *governance networks*.

Governance networks merupakan model pemerintahan yang merujuk pada sifat horizontal dan kesetaraan dalam negosiasi regulasi yang mengatur hubungan bersama oleh lebih dari satu aktor yang berinterdependensi satu sama lain dan berkemampuan untuk *self-organizing* atau *self-governing* dalam mewujudkan tujuan publik bersama⁸. *Governance network* juga dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang interaktif dengan potensi menyatukan beragam aktor yang otonom dan saling tergantung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan kebijakan publik yang lebih efektif dan komprehensif⁹. Beberapa jaringan yang terbentuk juga dapat memecahkan masalah yang rumit, menciptakan saling pengertian dan meningkatkan legitimasi dalam proses implementasi di antara para aktor.

⁷ Goldsmith, Stephen and Eggers, William D. 2004. *Governing by Network*. Washington DC: Brookings Institution Press

⁸ Aisah, Yuni Siti. 2015. *Governance Networks Dalam Program The Sunan Giri Awards Di Kabupaten Gresik*. Publika, 3(5)

⁹ Martinez, Laia. 2011. *Governance Networks as Collaborative platforms for Innovation in the Public Sector*. Network Governance: Theories, Methods, and practice. *RUC October 2011* hal. 1-13.

Governance network dapat melayani berbagai tujuan, seperti menciptakan ide-ide baru dalam birokrasi atau membina kerja sama diantara aktor sektor publik. Tujuan dari adanya *governing by network* ini adalah untuk menghasilkan nilai publik maksimum yang lebih besar daripada yang dihasilkan oleh masing-masing pemain tunggal tanpa adanya kolaborasi. *Governance networks* juga dapat dijadikan platform kolaborasi antar aktor yang mana dapat mendorong terciptanya inovasi di sektor publik. Melalui *governance networks* pemerintah memiliki kemungkinan besar untuk menjangkau permasalahan lebih dekat dengan memanfaatkan keunggulan *network* serta mengembangkan gagasan inovatif untuk menanggulangi masalah publik maupun meningkatkan kualitas pelayanan serta kebijakan publik.

Terdapat beberapa cara dalam meningkatkan keefektifan *Governance network* yang dikemukakan oleh Torfing et al dalam bukunya yaitu (a) *Institutional Design* (desain kelembagaan) yang bertujuan untuk mempengaruhi ruang lingkup, karakter, komposisi, dan prosedur jaringan tata kelola; (b) *Goal and framework steering* (penyesuaian tujuan dan kerangka kerja) yang berusaha untuk menentukan tujuan politik, kondisi fiskal, dasar hukum, dan alur cerita diskursif jaringan pemerintahan; (c) *Process management* (manajemen proses) yang berupaya mengurangi ketegangan, menyelesaikan konflik, memberdayakan aktor tertentu, dan menurunkan biaya transaksi dalam jaringan tata kelola; dan (d) *Direct participation* (partisipasi langsung) yang berupaya untuk mempengaruhi

agenda kebijakan, berbagai opsi yang memungkinkan, tempat untuk pengambilan keputusan, dan keluaran kebijakan yang dinegosiasikan dari jaringan tata kelola¹⁰.

Isu *governance* di Indonesia saat ini erat kaitannya dengan proses desentralisasi, yang mana sekarang ini lebih terfokus kepada *governance* di tingkat lokal¹¹. Sistem pemerintahan di Indonesia sejak era reformasi dimana salah satu agenda utamanya penguatan otonomi daerah, yang mana regulasi terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* telah berubah dari yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Kebijakan otonomi daerah ini telah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk didalamnya pembangunan desa. Kemudian, Indonesia yang terdiri dari 75.436 desa (74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat)¹² membuat kehadiran desentralisasi seakan menjadi angin segar bagi masyarakat dan pemerintahan daerah sampai ke tingkat desa. Karena pemerintah daerah dianggap paling mengenal masyarakatnya dan wilayahnya sendiri, sehingga tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya.

Kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu wilayah atau daerah atau desa dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor penting untuk keberhasilan pembangunan yaitu adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Jika pembangunan melibatkan peran serta masyarakat maka pembangunan tersebut akan lebih efektif, karena masyarakatlah yang memahami kondisi, potensi permasalahan dan

¹⁰ Torfing, J., B.G. Peters, J. Pierre and E. Sorensen.2012. *Interactive Governance. Advancing and Paradigm*, Oxford: Oxford University Press.

¹¹ Syamsurizaldi, dkk. (2019). *Model Collaborative Governance pada Nagari Rancak di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Pembangunan Nagari, 4(1), 99-11

¹² databoks.katadata.co.id. diakses pada tanggal 14 Juni 2020 Pukul 23.33

kapasitas lokal maka dengan demikian kebutuhan dan kepentingan lokal akan lebih dapat teridentifikasi dan terakomodasi¹³.

Adanya partisipasi masyarakat maka proses pemerintahan yang dijalankan telah memiliki salah satu karakteristik sebagai pemerintahan yang baik¹⁴. Selain itu juga diperlukan peran sektor swasta untuk membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah seperti menyediakan lapangan pekerjaan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik. Untuk mewujudkan semua itu maka pemerintah dituntut untuk lebih interaktif dalam menyelenggarakan pemerintah, karena seperti yang telah disebutkan di awal, bahwa pemerintah sekarang ini bukanlah sebagai aktor tunggal dalam merumuskan sebuah kebijakan. Terdapat aktor-aktor informal lain yang juga menunjang dalam menciptakan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu pemerintah, masyarakat dan sektor swasta harus saling berinteraksi untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai demi mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya.

Beberapa kasus di Indonesia, khususnya yang terjadi di pedesaan menunjukkan bahwa model-model *governance* mampu memberikan kontribusi positif pada pembangunan desa. Pemerintah lokal termasuk didalamnya pemerintah desa memiliki peluang untuk bermitra dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kerjasama dengan aktor non pemerintahan, baik itu dengan organisasi yang bersifat profit maupun non profit.

¹³ Indrawijaya, Adam Ibrahim, dkk. *Revitalisasi Administrasi Pembangunan (Berbasis Jatidiri Dan Karakter Bangsa Dalam Pembangunan Nasional)*. Alfabeta. Bandung. 2011. hal : 63

¹⁴ Abady, Aryati Puspasari. 2013. *Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah*. Otoritas. 3(1).

Kerjasama yang dijalankan dapat berdampak positif baik bagi pemerintahan daerah dan juga masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Aisah yang mengkaji mengenai *Governance networks* dalam program The Sunan Giri Awards menemukan bahwa hubungan yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan aktor diluar pemerintah akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik¹⁵. Selain itu, Putri yang meneliti mengenai pola relasi kuasa antara Negara, NGO, dan masyarakat dalam Pos pemberdayaan keluarga juga menemukan bahwa keterlibatan aktor diluar pemerintah dapat mengisi lubang kekosongan yang tidak dimiliki oleh pemerintah desa, dan berdampak pada kepuasan masyarakat dalam menerima manfaat dari relasi yang terjalin antara pemerintah dengan aktor diluar pemerintah.¹⁶

Salah satu daerah di Indonesia yang merasakan manfaat dengan adanya keterlibatan aktor diluar pemerintah yaitu Provinsi Sumatera Barat. Jika berbicara mengenai pembangunan desa atau lebih dikenal sebagai nagari di Provinsi Sumatera Barat tidak lengkap jika tidak membicarakan salah satu aktor penting diluar pemerintah yaitu perantau. Menariknya perantau merupakan masyarakat nagari (desa) yang bertempat tinggal, mencari penghidupan atau menuntut ilmu di luar daerah asalnya. Daerah asal itu dikonotasikan dengan Nagari tempat kelahirannya, dan dibuktikan dengan suku yang dimilikinya. Merantau menurut Naim, merupakan tipe khusus dari migrasi suku minangkabau yang tidak mudah

¹⁵ Aisah, Yuni Siti.2015. *Governance Networks Dalam Program The Sunan Giri Awards Di Kabupaten Gresik*. Publika, 3(5)

¹⁶ Putri, Adninda Gustia. 2014. *Pola Relasi Kuasa Antara Negara, NGO, dan Masyarakat dalam Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan (Studi Posdaya Delima, Gemawang, Sinduadi, Mlati, Sleman)*. Skripsi. Ilmu pemerintahan (politik dan pemerintahan).

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, tujuan merantau sering dikaitkan dengan tiga hal, yaitu mencari ilmu, mencari pekerjaan, (pangkat) dan mencari harta¹⁷.

Kebiasaan dan budaya merantau orang Minang pada satu sisi merupakan sebuah potensi yang diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nagari. Pada sisi lain, ada juga yang berpikir bahwa nagari yang masyarakatnya mayoritas merantau berarti semakin berkurangnya tenaga-tenaga potensial untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan. Namun hal ini tidak berlaku dalam pembangunan nagari di Sumatera Barat, karena mengalirnya tenaga-tenaga muda ini ke daerah lain tidaklah dianggap sebagai hilangnya potensi, tapi ini justru memperkaya daerah¹⁸ karena bertambahnya *network* nagari di tempat lain. Penelitian yang dilakukan oleh Emita et al juga menemukan bahwa peran perantau sangat membantu dalam pembangunan nagari, tepatnya di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, baik dari fisik seperti pembangunan masjid, mushola dan sumber air bersih maupun dari segi non fisik seperti pemberian beasiswa. Selain itu perantau juga ikut berperan dalam membangun kembali nagari pasca gempa 30 September 2009. Penelitian yang dilakukan oleh Putri di Nagari Sungai Asam ini yang dulunya merupakan Korong dari Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2 X 11 Anam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman yang menemukan betapa besarnya peran

¹⁷ Naim, Mochtar. 1984. *Merantau : Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Gajah Mada Universitas Press. Jogjakarta.

¹⁸ Ajiswarman. 1996. *Partisipasi Perantau Minang dalam Pembangunan Pedesaan (kasus Perantau asal Sulit Air dalam organisasi Sulit Air Sepakat (SAS) Cabang Menteng Jakarta Selatan)*. Skripsi. Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

perantau dalam membangun sarana sosial dan sarana umum yang rusak pasca gempa.¹⁹

Suatu nagari tidak cukup hanya memiliki perantau yang banyak saja, namun diperlukan pemerintahan yang terbuka atau fleksibel sehingga akan mendorong terciptanya inovasi dalam pembangunan nagari. Hubungan baik yang terjalin antara pemerintahan nagari dengan perantau ikut berpengaruh terhadap partisipasi perantau dalam memajukan nagari. Penelitian Syamsurizaldi mengemukakan bahwa salah satu aktor kunci yang ikut berkolaborasi dalam penyelenggaraan nagari rancak di Sumatera Barat adalah perantau, dan salah satu faktor penentu keikutsertaan perantau dalam pembangunan nagari yaitu karena Wali Nagari yang terbuka atau *open minded*²⁰. Adanya hubungan yang terjalin baik antara Wali Nagari dengan perantau biasanya akan menentukan seberapa besar peran perantau dalam pembangunan nagari. Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti membangun asumsi bahwa praktek interaksi (*Interactive Governance*) antara pemerintahan nagari dengan para perantau sangat menentukan sejauh mana potensi perantau itu dapat dimaksimalkan untuk mendukung kemajuan pembangunan nagari.

Perantau minang yang dapat kita temukan di hampir seluruh pelosok Indonesia ini merupakan sebuah aset yang tidak dilewatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan membentuk Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau (BKPR) yang tupoksinya sebagai fasilitator untuk menjalin jejaring

¹⁹ Putri, Pristyanilicia. 2018. *Peranan urang rantau terhadap pembangunan masyarakat nagari pasca gempa 30 september 2009*. Seminar Nasional Royal (SENAR), hal 497-502.

²⁰ Syamsurizaldi, dkk. (2019). *Model Collaborative Governance pada nagari rancak di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal pembangunan nagari,4(1),99-11.

dan mengikutsertakan para perantau ke dalam perumusan sebuah kebijakan sehingga model pengambilan keputusan lebih bersifat *bottom-up* dan akan lebih menyentuh kepentingan masyarakat. Hal ini karena perantau dianggap representatif dari masyarakat setempat. Serta keberadaan perantau dalam pembangunan nagari juga sangat membantu pemerintah karena perantau dapat menyumbangkan ide pikiran, tenaga, menyebarkan jaringan, serta dana yang dapat menutup keterbatasan pemerintah nagari. Oleh karena itu, di banyak nagari di Provinsi Sumatera Barat masih dapat ditemukannya interaksi yang terjalin dengan baik antara pemerintah nagari dengan perantau dalam pembangunan nagari, salah satunya yaitu Nagari Sumanik di Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

Tingginya kepedulian perantau terhadap pembangunan Nagari Sumanik disampaikan oleh Kasubag Kerjasama dan Koordinasi PMD, Transmigrasi dan Dukcapil, dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

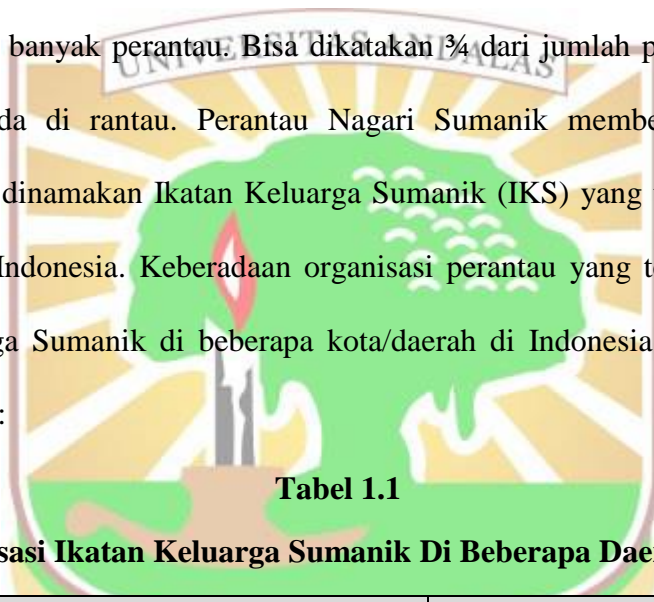
“Nagari Sumanik merupakan salah satu nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang dapat dikatakan cukup beruntung. Mereka mempunyai jumlah perantau yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia dan memiliki ikatan keluarga di daerah perantauan masing-masing, dan tidak hanya tersebar di banyak daerah, namun mereka juga kompak dalam hal membantu pembangunan Nagari Sumanik. Kepedulian mereka yang cukup tinggi sangat membantu pembangunan di Nagari Sumanik.” (Wawancara dengan Beni Oriza, SE, Kasubag Kerjasama dan Koordinasi PMD, Transmigrasi dan Dukcapil. Pada tanggal 1 Juli 2020. pukul 13.35)

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita katakan bahwasanya pemerintah nagari tidak sendiri dalam melaksanakan pembangunan di Nagari Sumanik, tetapi terdapat beberapa pembangunan yang diinisiasi oleh perantau. Kepedulian perantau di Nagari Sumanik ini merupakan sebuah potensi yang tidak dapat dilewatkan begitu saja oleh pemerintah nagari.

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Wali Nagari Sumanik Bapak Irama Yandi, S.AP mengatakan :

“Nagari Sumanik memang identik dengan perantau nya yang hampir tersebar di kota kota besar di Indonesia, yang tergabung dalam nama IKS (Ikatan Keluarga Sumanik). Banyak pembangunan-pembangunan yang ada di Nagari Sumanik yang berasal dari kontribusi perantau” (Wawancara dengan Wali Nagari Sumanik pada tanggal 30 desember 2019).

Nagari Sumanik merupakan salah satu nagari di Kabupaten Tanah Datar yang memiliki banyak perantau. Bisa dikatakan $\frac{3}{4}$ dari jumlah penduduk Nagari Sumanik berada di rantau. Perantau Nagari Sumanik membentuk organisasi perantau yang dinamakan Ikatan Keluarga Sumanik (IKS) yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Keberadaan organisasi perantau yang terhimpun dalam Ikatan Keluarga Sumanik di beberapa kota/daerah di Indonesia dapat kita lihat pada Tabel 1.1:



Tabel 1.1

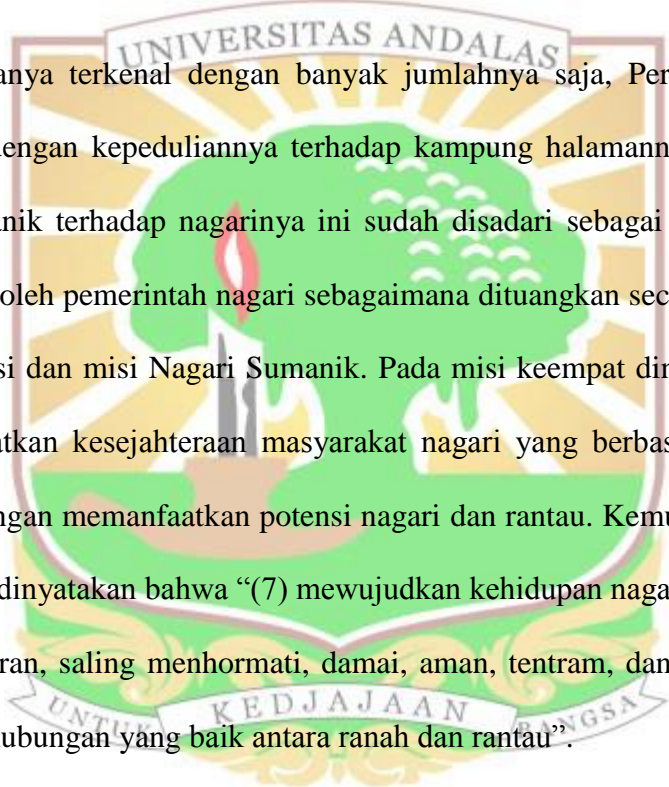
Organisasi Ikatan Keluarga Sumanik Di Beberapa Daerah/Kota

No	Nama	Daerah
1	Ikatan Keluarga Sumanik Pekanbaru	Pekanbaru, Sumatera Utara, Aceh, Kepulauan Riau
2	Ikatan Keluarga Sumanik Padang	Kota Padang dan sekitarnya
3	Ikatan Keluarga Sumanik Tanah datar	Khusus daerah Tanah datar
4	Ikatan Keluarga Sumanik Bukittinggi	Khusus daerah Bukittinggi
5	Ikatan Keluarga Sumanik Lampung	Lampung
6	Ikatan Keluarga Sumanik Jabodetabek	Pulau Jawa sampai ke Pulau Papua

Sumber : Hasil olahan wawancara peneliti dengan salah satu pengurus IKS. 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat kita lihat tidak semua kota terdapat kepengurusan Ikatan Keluarga Perantau Sumanik, namun mereka tergabung ke dalam perwakilan-perwakilan minang setempat namun tetap berkontribusi

terhadap ikatan perantau sumanik, misalnya perantau yang berada di Papua dapat memberikan bantuannya melalui IKS Jabodetabek, Perantau yang berada di Aceh dapat memberikan bantuannya melalui IKS Pekanbaru. Pemerintah Nagari Sumanik tidak terlibat dalam hal pembentukan ikatan perantau disuatu daerah, pemerintah nagari dalam hal ini Wali Nagari hanya diberitahu oleh salah satu perwakilan perantau bahwa akan ada pembentukan ikatan keluarga sumanik yang baru.



Tidak hanya terkenal dengan banyak jumlahnya saja, Perantau Sumanik juga dikenal dengan kepeduliannya terhadap kampung halamannya. Kepedulian perantau sumanik terhadap nagarinya ini sudah disadari sebagai sebuah potensi pembangunan oleh pemerintah nagari sebagaimana dituangkan secara implisit dan jelas dalam visi dan misi Nagari Sumanik. Pada misi keempat dinyatakan bahwa “(4) meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi nagari dan rantau. Kemudian pada misi yang ke-tujuh dinyatakan bahwa “(7) mewujudkan kehidupan nagari yang bersatu, harmonis, toleran, saling menghormati, damai, aman, tentram, dan sejahtera serta mewujudkan hubungan yang baik antara ranah dan rantau”.

Hal ini cukup menarik, karena penegasan dalam visi dan misi Nagari memberikan indikasi besarnya perhatian pemerintahan nagari dalam pengelolaan potensi perantau dalam pembangunan nagari. Kemudian, dari perspektif *Interactive Governance* dan *network governance* diasumsikan bahwa pemerintahan nagari ingin memaksimalkan peran semua aktor dalam

pembangunan nagari termasuk para perantau yang berdomisili bukan di nagari sendiri.

Gambar 1. 1

Visi dan Misi Nagari Sumanik



Sumber : Dokumentasi Peneliti (2019).

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat terlihat bahwasannya pemerintah nagari menyadari besarnya pengaruh perantau dalam membantu pembangunan nagari sebagai salah satu potensi yang dimiliki Nagari Sumanik. Sehingga pemerintah Nagari Sumanik telah mendesain kelembagaannya menjadi institusi yang dapat menampung aspirasi perantau sumanik yang tertuang dalam visi misi kerja, yang

mana visi misi kerja ini memberikan perhatian besar terhadap tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat rantau dalam pembangunan nagarinya sendiri. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa lokasi penelitian dilakukan di Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

Selain itu, pemerintah nagari juga mengadakan rapat atau diskusi bersama para perantau dan tokoh masyarakat dengan maksud untuk memberitahu mengenai tujuan dan kerangka kerja pembangunan nagari yang telah disusun oleh pemerintah nagari. Rapat yang dihadiri oleh pemangku kepentingan lainnya ini lebih bersifat informal dan menjadi wadah bagi perantau untuk memberikan kritik dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari. Rapat tersebut juga dilakukan sebagai salah satu bentuk menjaga kepercayaan perantau terhadap pemerintah nagari karena telah memberikan kontribusinya kepada Nagari Sumanik. Karena perantau memiliki keterbatasan dalam hal jarak membuat koordinasi yang terjalin antara pemerintah Nagari Sumanik dengan perantau dapat dilakukan dengan dua cara yaitu langsung maupun tidak langsung.

Terdapat beberapa program pemerintah yang dibantu oleh para perantau, salah satunya yaitu pembangunan Posdaya Sumanik Sehat yang merupakan rumah singgah bagi lansia. Posdaya Sumanik Sehat ini merupakan satu-satunya rumah singgah lansia yang ada di Kabupaten Tanah Datar dan satu-satunya se-Sumatera Barat yang semua dana pembangunannya berasal dari swadaya perantau.

Gambar 1. 2

Rumah Singgah Umi Dalimo Posdaya Sumanik



Sumber: Hasil dokumentasi peneliti (2019)

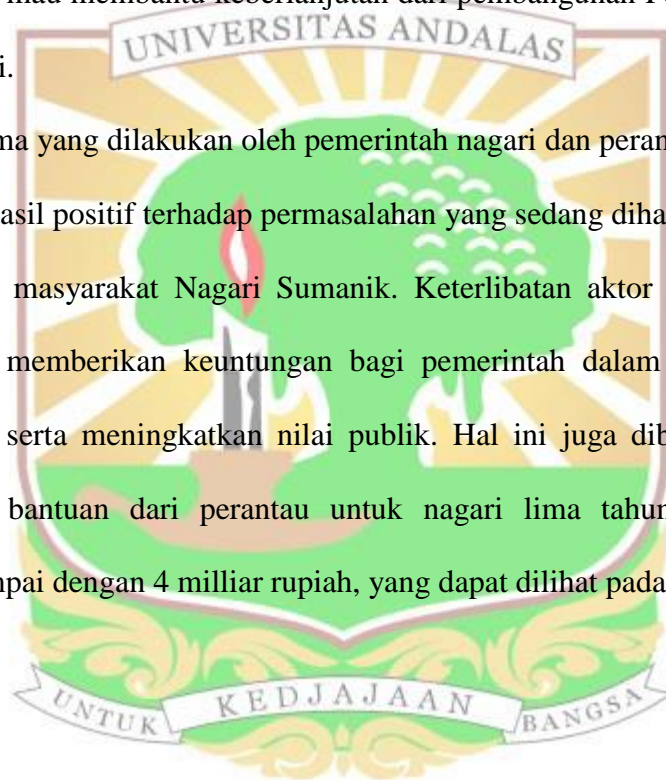
Posdaya yang dibangun diatas tanah wakaf masyarakat setempat sejak 2013 itu merupakan hasil pembangunan dari sumbangan yang di himpun Perantau Nagari Sumanik. Pembangunan pertama Posdaya ini memakan biaya sampai dengan 500 juta dan uang tersebut seluruhnya berasal dari swadaya rantau. Hal ini juga dibenarkan oleh Wali Nagari Sumanik dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Pembangunan Posdaya Sumanik Sehat ini memakan biaya awal sebesar lebih dari 500 juta dan murni seluruhnya dari sumbangan perantau tidak ada dana pemerintah yang masuk ke posdaya, karena pada saat itu tidak ada anggaran nagari untuk Posdaya” (Wawancara dengan Wali Nagari Sumanik pada tanggal 30 desember 2019).

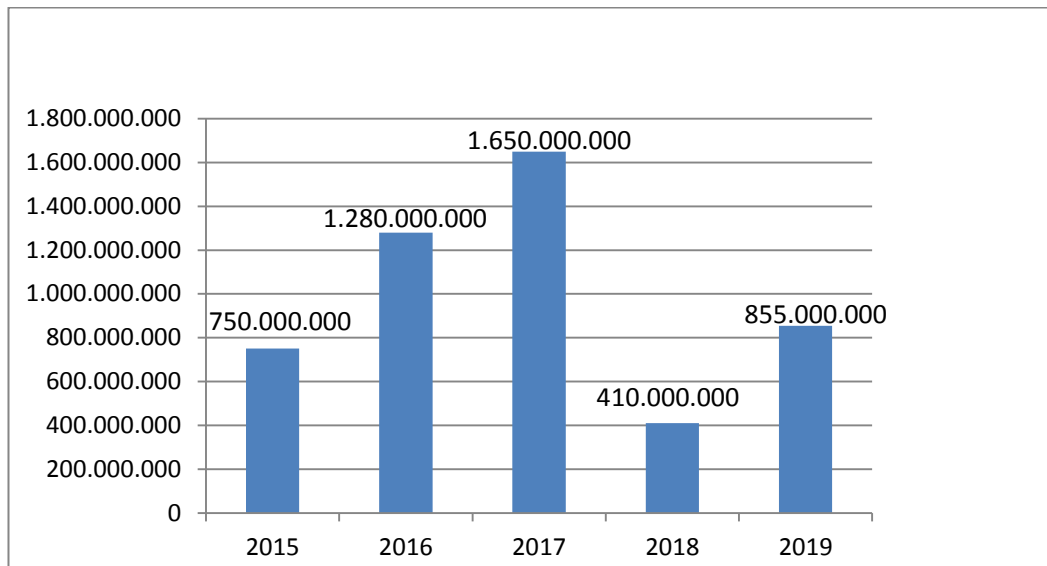
Pembangunan posdaya ini merupakan salah satu bentuk partisipasi langsung perantau dalam pembangunan nagari. Perantau sebagai aktor non pemerintah bekerjasama dengan pemerintah nagari untuk merealisasikan pembangunan posdaya ini yang tujuannya yaitu untuk mensejahterakan para lansia. Kedua pihak

yaitu perantau dan pemerintah nagari disini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Nagari Sumanik. Dalam hal ini perantau membantu pemerintah dalam mengisi kekosongan yang tidak dimiliki oleh pemerintah Nagari Sumanik serta menguatkan daya yang dimiliki masyarakat lokal dan masyarakat menerima manfaat dari relasi tersebut. Dengan adanya rasa kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah nagari kepada perantau membuat perantau tetap mau membantu keberlanjutan dari pembangunan Posdaya Sumanik sampai saat ini.

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah nagari dan perantau diduga telah memberikan hasil positif terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh publik dalam hal ini masyarakat Nagari Sumanik. Keterlibatan aktor non pemerintah diduga dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah dalam menanggulangi permasalahan serta meningkatkan nilai publik. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya dana bantuan dari perantau untuk nagari lima tahun terakhir yang berjumlah sampai dengan 4 miliar rupiah, yang dapat dilihat pada Gambar 1.3



Gambar 1.3
Rekapitulasi Dana Rantau Untuk Nagari



Sumber: Laporan Rekapitulasi Dana Rantau Sumanik untuk Nagari tahun 2015-2019, diolah.

Berdasarkan Gambar 1.3 terlihat pada tahun 2015-2017 dana dari rantau selalu meningkat, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali. Hal ini karena bantuan dari perantau merupakan bantuan yang tidak terikat dan tidak ditetapkan nominalnya oleh Pemerintahan Nagari, sehingga bantuan yang diberikan oleh perantau tergantung atas dasar kemampuan perantau pada saat itu. Walaupun mengalami penurunan, bantuan dari perantau untuk nagari sumanik selalu ada setiap tahunnya. Proses *Interactive Governance* yang terjadi antara pemerintah Nagari Sumanik dengan perantau menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat perantau merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh Nagari Sumanik dalam pembangunan nagari.

Berdasarkan fenomena empiris yang ditemukan dilapangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "*Interactive Governance* dalam

Pengelolaan Potensi Perantau untuk Pembangunan Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mengarahkan kajiannya pada “Bagaimana Pengelolaan Potensi Perantau dalam Pembangunan Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung dilihat dari Perspektif *Interactive Governance*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan potensi perantau untuk pembangunan Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dari perspektif *Interactive Governance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan khususnya pada bidang kajian ilmu administrasi public dan administrasi pembangunan khususnya dalam pengembangan aplikasi teori-teori governance dan *Interactive Governance* pada konteks partisipasi perantau dalam pembangunan desa sebagai wujud tata kelola pemerintah lokal (*local governance*).

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan dalam pembangunan

pedesaan pada umumnya, serta untuk memberitahu informasi mengenai pentingnya potensi perantau dalam pembangunan nagari di Provinsi Sumatera Barat.

